

PERUBAHAN RENCANA KERJA BPKAD 2025





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.....	6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	29
3.1 Program dan Kegiatan.....	29
BAB IV PENUTUP.....	47



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....	23
Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025.....	42



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 343 ayat 1 bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Nomor 000.7/6908/436.8.1/2025 Hal Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan lampira Perubahan RKPD. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran, perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan.





Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025 sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Maksud disusunnya Perubahan Renja Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Tahun 2025 adalah untuk :

1. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui target kinerja program dan kegiatan pembangunan sampai dengan Triwulan I tahun 2025
2. Memberikan acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 antara lain :



1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur atau Jawa Tengah atau Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,



- Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.



1.3. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Maksud dan Tujuan
1.2	Landasan Hukum
1.3	Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan.

Terkait target capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan I dijelaskan secara detail pada Tabel 2.1. Secara umum Tabel 2.1 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini diukur dengan indikator tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan dengan target capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 93% dan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 250.876.863.000, sedangkan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 95.83% dan realisasi kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 7.290.175.000. Program ini terdiri atas 4 kegiatan antara lain:

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja persentase ketepatan waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target capaian kinerja pada Tahun 2025 sebesar 100% dan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 243.658.664.000, sedangkan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 100% dan realisasi kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 6.474.524.000. Kegiatan ini terdiri atas 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN diukur dengan indikator kinerja jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target capaian kinerja tahun 2025 sebesar 89 orang/bulan dan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 243.658.664.000, sedangkan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 88 orang/bulan dan realisasi kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 6.474.524.000.

- b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



Kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja persentase pemenuhan unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan dengan target capaian kinerja pada Tahun 2025 sebesar 100% dan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 140.224.000, sedangkan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 100% dan realisasi kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 0. Kegiatan ini terdiri atas 1 sub kegiatan yaitu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya diukur indikator kinerja jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan dengan target capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 200 unit dan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 140.224.000, sedangkan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 200 unit dan realisasi kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 0.

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan ini diukur dengan 2 indikator kinerja yaitu :

- Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran dengan target capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 100%
- Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran dengan target capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 100%

Total kebutuhan pagu indikatif kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.880.883.000 dan realisasi kebutuhan pagu indikatif sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 493.761.000

Kegiatan ini terdiri atas 2 sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor diukur dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target capaian kinerja tahun 2025 sebesar 12 laporan dan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 2.460.965.000, sedangkan realisasi capaian kinerja



sampai dengan Triwulan I sebesar 3 laporan dan realisasi kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 397.027.000.

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor diukur dengan indikator kinerja jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target capaian kinerja tahun 2025 sebesar 12 laporan dan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 419.918.000, sedangkan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 3 laporan dan realisasi kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 96.735.000.

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja persentase ketepatan pemenuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dengan target capaian kinerja tahun 2025 sebesar 100% dan kebutuhan pagu indikatif sebesar 4.197.092.000, sedangkan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 100% dan realisasi kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 321.890.000.

Kegiatan ini terdiri atas 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan diukur dengan indikator kinerja jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dengan target capaian kinerja tahun 2025 sebesar 2.380 unit dan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 4.197.092.000, sedangkan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 230 unit realisasi kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 321.890.000.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diukur dengan indikator kinerja persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran dengan target capaian kinerja tahun 2025 sebesar 100% dan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp.



44.340.562.000, sedangkan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 100% dan realisasi kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 1.050.971.000.

Program ini terdiri atas 4 kegiatan antara lain :

a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun dengan target capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 7 dokumen dan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 3.580.704.000, sedangkan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 0 dokumen dan realisasi kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 553.117.000.

Kegiatan ini terdiri atas 4 sub kegiatan antara lain :

- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS diukur dengan indikator kinerja jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun dengan target capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 2 dokumen dan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 1.230.976.000, sedangkan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 0 dokumen dan realisasi kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 298.262.000.
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diukur dengan indikator kinerja jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan target capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 1 dokumen dan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 759.023.000, sedangkan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 0 dokumen dan realisasi kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 88.700.000.



- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD diukur dengan indikator kinerja jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan target capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 2 dokumen dan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 1.269.578.000, sedangkan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 0 dokumen dan realisasi kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 118.256 .000
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan diukur indikator kinerja jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun dengan target capaian Tahun 2025 sebesar 2 dokumen dan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 321.126.000, sedangkan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 0 dokumen dan realisasi kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 47.900.000.
- b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Kegiatan ini diukur dengan 2 indikator kinerja antara lain :
- Jumlah Dokumen Laporan dan Perhitungan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang Dikelola dengan target capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 244 dokumen dan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 60 dokumen.
 - Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani dengan target capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 99.464 berkas dan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 19.785 berkas
- Total kebutuhan pagu indikatif kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 1.932.405.000 dan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp.265.566.000.

Kegiatan ini terdiri atas 2 sub kegiatan antara lain :



- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah diukur dengan indikator kinerja jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan target capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 244 dokumen dan kebutuhan pagu indikatif sebesar 541.828.000, sedangkan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 60 dokumen dan realisasi kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 105.945.000.
 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait diukur dengan indikator kinerja jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait dengan target capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 99.464 dokumen dan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 1.390.578.000, sedangkan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 19.785 dokumen dan realisasi kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 159.621.000.
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun dengan target capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 24 dokumen dan kebutuhan pagu indikatif sebesar 1.327.453.000, sedangkan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 9 dokumen dan realisasi kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 189.987.000.
- Kegiatan ini terdiri atas 1 sub kegiatan yaitu Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diukur dengan indikator kinerja jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan target capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 24 dokumen dan kebutuhan pagu indikatif sebesar 1.327.453.000, sedangkan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 9 dokumen dan realisasi



kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 189.987.000.

d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan ini diukur dengan 2 indikator yaitu :

- Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana dengan target capaian kinerja Tahun 2025 sebesar sebesar 100% dan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 0%
- Persentase realisasi dana darurat dan mendesak dengan target capaian kinerja Tahun 2025 sebesar sebesar 25% dan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 0%

Total kebutuhan pagu indikatif kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 37.500.000.000 dan realisasi kebutuhan pagu indikatif sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 42.301.000.

Kegiatan ini terdiri atas 2 sub kegiatan yaitu :

- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan diukur dengan indikator kinerja jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan target capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 1 laporan dan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 500.000.000, sedangkan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 0 laporan dan realisasi kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 0
- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak diukur dengan indikator kinerja jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan target capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 1 laporan dan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 37.000.000.000, sedangkan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 0 laporan dan realisasi kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 42.301.000.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diukur dengan indikator kinerja persentase tanah aset yang telah diproses pada tahap peta bidang dengan target capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 33.3% dan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp.



26.855.210.000, sedangkan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 8.33% dan realisasi kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 5.436.539.000

Program ini terdiri atas 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Barang Milik Daerah diukur dengan 2 indikator yaitu :

- Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola dengan target capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 100%
- Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani dengan target capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 30 dokumen dan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 7 dokumen

Total kebutuhan pagu indikatif kegiatan ini Tahun 2025 sebesar Rp. 26.855.210.000 dan realisasi kebutuhan pagu indikatif sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 5.436.539.000.

Kegiatan ini terdiri atas 4 sub kegiatan antara lain :

- a. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah diukur dengan indikator kinerja jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan target capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 7.679 dokumen dan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 17.652.981.000, sedangkan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 1.916 dokumen dan realisasi kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 3.828.264.000
- b. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator kinerja jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan target capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 60 orang dan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 1.388.350.000, sedangkan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 60 orang dan



realisasi kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 283.594.000.

- c. Pengamanan Barang Milik Daerah diukur dengan indikator kinerja jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah dengan target capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 4 laporan dan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 6.207.685.000, sedangkan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 1 laporan dan realisasi kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 1.005.311.000.
- d. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah diukur dengan indikator kinerja jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 30 laporan dan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 1.606.194.000, sedangkan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 7 laporan dan realisasi kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 319.370.000.

Adapun faktor pendorong dalam capaian indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator Opini BPK, faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja yaitu :
 - Laporan Keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintahan dan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017
 - Penyampaian Laporan Keuangan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel
 - Penyusunan Laporan Keuangan didukung oleh aplikasi yang kompatibel

Beberapa upaya peningkatan antara lain :

- Pendampingan kepada 63 puskesmas yang pada awal Tahun 2022 menjadi BLUD supaya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)
- Pengembangan aplikasi penyusunan LKPD disesuaikan dengan perubahan kode akun yang telah mengalami



- beberapa perubahan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Pencatatan aset yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021
 - Meminimalkan belanja silang yaitu penyesuaian belanja modal menjadi belanja barang dan jasa atau sebaliknya
2. Indikator nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja yaitu adanya tindak lanjut terhadap Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya dan menunjukkan hasil yang lebih baik dalam hal :
- Perencanaan Kinerja
 - Pengukuran Kinerja
 - Pelaporan Kinerja
 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
3. Indikator persentase aset tanah dan bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan aset tanah dan bangunan, indikator persentase tanah aset yang telah diproses sertipikasi pada tahap peta bidang, faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja yaitu :
- Koordinasi yang intensif dengan Kantor Pertanahan selama proses sertifikasi sampai dengan penerbitan peta bidang
 - Sinergi yang aktif khususnya kelurahan dan kecamatan dalam rangka upaya pendampingan dari *stakeholder* terkait melalui sosialisasi dan mediasi kepada masyarakat tentang status tanah aset Pemerintah Kota Surabaya
 - Komitmen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melakukan pengamanan aset melalui pemasangan papan nama aset, patok batas dan/atau pagar



- Optimalisasi, efisiensi dan integrasi data pada Aplikasi SIMBADA sebagai upaya untuk mempercepat pengelolaan aset daerah
- 4. Indikator persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja yaitu adanya sinergi dan komunikasi yang aktif serta pendampingan yang dilakukan setiap hari kepada Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) dan ketentuan perundangan yang berlaku
- 5. Indikator persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran, faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja yaitu :
 - Penyusunan dokumen anggaran telah sesuai dengan kebijakan perundang-undangan yaitu :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
 - Penyusunan dokumen anggaran didukung oleh aplikasi yang kompatibel
 - Beberapa upaya peningkatan yang dilakukan antara lain :
 - Pendampingan kepada 61 Perangkat Daerah terkait Penyusunan KUA dan Perubahan KUA, Penyusunan APBD dan Perubahan APBD serta penyusunan RKA
 - Pengembangan sistem aplikasi penyusunan dokumen anggaran yang terintegrasi
- 6. Indikator tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan, faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja yaitu :



- Tersedianya barang dan jasa yang dibutuhkan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sehingga berpengaruh pada tingkat kepuasan pegawai cukup tinggi sesuai target yang telah ditentukan
 - Mekanisme pengadaan barang dan jasa yang didukung oleh komitmen dan kerjasama semua elemen Perangkat Daerah
 - Adanya kebijakan yang responsif dalam penyediaan barang dan jasa
7. Indikator jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani, indikator jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani, indikator jumlah Dokumen Laporan dan Perhitungan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola, indikator jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait, faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja yaitu:
- Adanya dukungan sistem aplikasi Penatausahaan Keuangan Daerah (E-Payment, E-Inventory, E-Accounting, dan E-Revenue) yang memadai
 - Komitmen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberikan pelayanan konsultasi ke Perangkat Daerah (E-Payment, E-Inventory, E-Accounting, dan E-Revenue)
 - Koordinasi serta kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Surabaya
8. Indikator jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun, indikator jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD faktor pendorong dalam pencapaian



target kinerja yaitu:

- Komitmen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu
 - Tingkat kompetensi dan pemahaman Perangkat Daerah atas teknis pelaporan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) semakin meningkat sehingga penyampaian Laporan Keuangan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu
 - Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan atas Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan dan akuntabel
9. Indikator jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani, indikator jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah, faktor pendorong dalam pencapaian kinerja yaitu :
- Komitmen Perangkat Daerah dalam melakukan penyelamatan tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya dengan secara aktif mengajukan permohonan bantuan hukum
 - Sinergi yang baik dengan Kejaksaan, Polrestabes dan Akademisi dalam proses penyelesaian permasalahan tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya
10. Indikator jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun, indikator jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang



disusun, indikator jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun, indikator jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, indikator jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, faktor pendorong dalam pencapaian kinerja yaitu :

- Komitmen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan penyusunan dokumen anggaran secara tepat waktu
- Adanya kolaborasi dan komunikasi yang aktif antara pihak eksekutif dan legislatif
- Pendampingan yang intensif kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran dan dokumen anggaran
- Sumber daya manusia yang kompeten dalam penyusunan dokumen anggaran

11. Indikator persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola, indikator jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, faktor pendorong dalam pencapaian kinerja yaitu :

- Adanya pengiriman surat pemberitahuan/teguran yang berkelanjutan, sehingga pihak yang memanfaatkan dapat memperoleh informasi berkala masa berlaku Izin Pemakaian Tanah dan tagihan IPT yang belum terbayar
- Dilaksanakannya program polling retribusi IPT pada Hari Senin sampai dengan Jumat di Kantor Kelurahan terdekat dari obyek IPT, untuk memudahkan pemegang IPT membayar tagihan
- Adanya mekanisme pengajuan serta pembayaran pemanfaatan aset secara online melalui SSW Alfa



12. Indikator persentase pemenuhan unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan, indikator jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan, faktor pendorong dalam pencapaian kinerja yaitu :
 - Adanya dukungan anggaran
 - Komitmen Perangkat Daerah dalam pemenuhan barang dan jasa perkantoran secara tepat waktu sesuai kebutuhan
 - Adanya sinergi dan komunikasi yang aktif antara penyedia dan Perangkat Daerah terkait untuk berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan yang direncanakan
13. Indikator persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana, indikator jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, faktor pendorong dalam pencapaian kinerja yaitu kebijakan penyaluran bantuan keuangan Pemerintah Kota Surabaya telah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Indikator persentase realisasi dana darurat dan mendesak, faktor pendorong dalam pencapaian kinerja yaitu adanya kebijakan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak antara lain :
 - Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang



Pengelolaan Keuangan Daerah

- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Tidak Terduga
15. Indikator jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, faktor pendorong dalam pencapaian kinerja yaitu :
- Komitmen pimpinan Perangkat Daerah untuk menyelesaikan dokumen perencanaan tepat waktu
 - Proses administrasi Surat Tanda Setoran didukung adanya Sistem Penerimaan Daerah (E-Revenue) yang memadai dan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
 - Koordinasi serta kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Surabaya
16. Indikator jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, faktor pendorong dalam pencapaian kinerja yaitu realisasi pemeliharaan kendaraan dinas telah disesuaikan dengan rencana kebutuhan pembayaran pajak, service kendaraan, pembelian *spare part* berupa accu dan ban
17. Indikator jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah, faktor pendorong dalam pencapaian kinerja yaitu :
- Adanya koordinasi yang intensif dengan Kantor Pertanahan selama proses sertifikasi sampai dengan penerbitan peta bidang
 - Sinergi yang aktif khususnya kelurahan dan kecamatan dalam rangka upaya pendampingan dari *stakeholder* terkait melalui sosialisasi dan mediasi kepada masyarakat tentang status tanah aset Pemerintah Kota Surabaya



- Komitmen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melakukan pengamanan aset melalui pemasangan papan nama aset, patok batas dan/atau pagar
 - Komitmen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun laporan hasil pengamanan aset barang milik daerah baik pengamanan fisik maupun sertifikasi
18. Indikator persentase realisasi dana darurat dan mendesak, faktor pendorong dalam pencapaian kinerja yaitu :
- Adanya kebijakan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak antara lain :
 - Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Tidak Terduga
 - Komitmen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta koordinasi antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Perangkat Daerah yang mendukung penyusunan laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak secara tepat waktu
19. Indikator jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan, faktor pendorong dalam pencapaian kinerja yaitu :
- Mekanisme pelaporan penyediaan barang dan jasa yang akurat dan tepat waktu
 - Realisasi pekerjaan menyesuaikan dengan alokasi kebutuhan dan perencanaan anggaran



- Adanya komitmen dan kerja keras semua elemen di Perangkat Daerah untuk berperan aktif dalam proses penyediaan barang dan jasa
 - Perencanaan anggaran sesuai dengan kebijakan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
20. Indikator jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, faktor pendorong dalam pencapaian kinerja yaitu :
- Mekanisme pelaporan penyediaan barang dan jasa yang akurat dan tepat waktu
 - Realisasi pekerjaan menyesuaikan dengan alokasi kebutuhan dan perencanaan anggaran
 - Adanya komitmen dan kerja keras semua elemen di Perangkat Daerah untuk berperan aktif dalam proses penyediaan barang dan jasa
20. Indikator jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN, faktor pendorong dalam pencapaian kinerja yaitu :
- Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antar Perangkat daerah
 - Adanya sistem yang menunjang mekanisme percepatan administrasi dalam penyediaan gaji dan tunjangan ASN
21. Indikator jumlah orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, faktor pendorong dalam pencapaian kinerja yaitu komitmen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah dalam rangka peningkatan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah antara lain :
- Rekonsiliasi data aset dengan pengurus barang di Perangkat Daerah dilakukan rutin setiap bulan
 - Pendampingan dana kelurahan terkait kode rekening pencatatan Barang Milik Daerah bagi kelurahan



- Pendampingan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)

Secara keseluruhan dapat dideskripsikan bahwa capaian target kinerja sampai dengan triwulan I Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada level kegiatan dan sub kegiatan telah mencapai target sesuai yang direncanakan. Indikasi ini dapat dilihat dari persentase capaian target kinerja yang ada pada indikator kegiatan dan sub kegiatan. Dari hasil analisa capaian target kinerja, terdapat indikator sub kegiatan yang belum maksimal dalam pencapaian target kinerja yaitu :

1. Indikator persentase ketepatan waktu Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, indikator jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi capaian kinerja indikator persentase ketepatan waktu Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, indikator jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya adalah penyesuaian usulan pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas operasional dari Perangkat Daerah.

Adapun langkah konkret yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian target kinerja yaitu melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait mekanisme pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas.

2. Indikator jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi capaian kinerja indikator jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah yaitu :

- Adanya pengajuan keringanan/pengurangan retribusi sewa Izin Pemakaian Tanah (IPT)
- Adanya tren sebagian masyarakat pemegang IPT yang menolak



melakukan pembayaran retribusi

Adapun langkah konkret yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian target kinerja antara lain :

- Melakukan kegiatan jemput bola penagihan retribusi sewa kepada pemegang IPT
- Mengadakan polling setiap Hari Senin sampai dengan Jumat di Kantor Kelurahan



Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K							Rp.(000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																					
5.02		Keuangan																					
5.02.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			47,229,588		35,014,394		250,876,863		7,290,175		-		-		-		7,290,175		7,290,175		15,44%
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan [560]	94 %		93.83 %		93 %		95.83 %		-		-		-		95.83 %		95.83 %		101.95%	
5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			33,513,641				243,658,664		6,474,524		-		-		-		6,474,524		6,474,524		19.32%
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN [751]	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		100 %		100.00%	
5.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [1113]			33,513,641				243,658,664		6,474,524		-		-		-		6,474,524		6,474,524		19,32%
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [4583]	83 Orang/bulan		89 Orang/bulan		89 Orang/bulan		88 Orang/bulan		-		-		-		88 Orang/bulan		88 Orang/bulan		106.02%	
5.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2,257,261				140,224		0		-		-		-		0		0		0.00%
			Persentase pemenuhan unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan [1906]	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		100 %		100.00%	
5.02.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [271]			2,257,261				140,224		0		-		-		-		0		0		0,00%
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [4578]	200 Unit		200 Unit		200 Unit		200 Unit		-		-		-		200 Unit		200 Unit		100.00%	
5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,433,985				2,880,883		493,761		-		-		-		493,761		493,761		20.29%



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DERAH KOTA SURABAYA
PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3				4	5		6		7		8		9	10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%				
						Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran [963]	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		100 %		100.00%	
						Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran [660]	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		100 %		100.00%	
5.02.01.2.08.0004						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [1707]		2,381,130			2,460,965			397,027		-		-		-		397,027		397,027		16,67%
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [4593]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%	
5.02.01.2.08.0003						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor [1167]		52,856			419,918			96,735		-		-		-		96,735		96,735		183,02%
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [4591]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%	
5.02.01.2.09						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		9,024,700			4,197,092			321,890		-		-		-		321,890		321,890		3,57%
						Persentase ketepatan pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor [1905]	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		100 %		100.00%	
5.02.01.2.09.0001						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [286]		9,024,700			4,197,092			321,890		-		-		-		321,890		321,890		3,57%
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [4579]	2.240 Unit		1821 Unit		2380 Unit		230 Unit		-		-		-		230 Unit		230 Unit		10,267.86%	
5.02.02						Program Pengelolaan Keuangan Daerah		21,876,639		6,715,608		44,340,562		1,050,971		-		-		-		1,050,971		1,050,971		4,80%
						Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran [1528]	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%	
5.02.02.2.01						Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		2,377,973			3,580,704			553,117		-		-		-		553,117		553,117		23,26%



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DERAH KOTA SURABAYA
PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3				4	5		6		7		8		9	10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%				
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun [655]	7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		0 Dokumen		-	-	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%				
5.02.02.2.01.0001					Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS [3439]			570,265			1.230.976		298.262		-	-	-		298.262		298.262		52,30%			
						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun [4594]	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		-	-	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%				
5.02.02.2.01.0007					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang			595,726			759.023		88.700		-	-	-		88.700		88.700		14,89%			
					Penjabaran APBD [1139]																					
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD [4587]	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		-	-	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%				
5.02.02.2.01.0008					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD [1143]			637,253			1.269.578		118.256		-	-	-		118.256		118.256		18,56%			
						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD [4588]	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		-	-	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%				
5.02.02.2.01.0002					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS [3440]			574,729			321.126		47.900		-	-	-		47.900		47.900		8,33%			



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DERAH KOTA SURABAYA
PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (AkhirPeriode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3				4	5		6		7		8		9	10	11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
						Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun [4595]	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0 Dokumen		-		-		-		0 Dokumen		0 Dokumen		0.00%	
5.02.02.2.02					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			2,805,285				1,932,405		265,566		-		-		-		265,566		265,566		9.47%
						Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani [1908]	104440 berkas		108992 berkas		99464 berkas		19785 berkas		-		-		-		19785 berkas		19785 berkas		18.94%	
						Jumlah Dokumen Laporan dan Perhitungan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola [2166]	244 Dokumen		244 Dokumen		244 Dokumen		60 Dokumen		-		-		-		60 Dokumen		60 Dokumen		24.59%	
5.02.02.2.02.0001					Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah [1130]			625,752				541.828		105.945		-		-		-		105.945		105.945		16,93%
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah [4586]	244 Dokumen		244 Dokumen		244 Dokumen		60 Dokumen		-		-		-		60 Dokumen		60 Dokumen		24.59%	
5.02.02.2.02.0009					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait [1122]			2,179,533				1.390.578		159.621		-		-		-		159.621		159.621		7,32%
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait [4585]	104440 Dokumen		108992 Dokumen		99464 Dokumen		19785 Dokumen		-		-		-		19785 Dokumen		19785 Dokumen		18.94%	
5.02.02.2.03					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1,193,382				1,327,453		189,987		-		-		-		189,987		189,987		15.92%
						Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun [551]	24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		9 Dokumen		-		-		-		9 Dokumen		9 Dokumen		37.50%	
5.02.02.2.03.0008					Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD [1119]			1,193,382				1.327.453		189.987		-		-		-		189.987		189.987		15,92%



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DERAH KOTA SURABAYA
PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (AkhirPeriode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)				
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
													K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1	2	3				4	5		6		7		8		9	10	11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%				
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD [4584]	24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		9 Dokumen		-		-		-		9 Dokumen		9 Dokumen		37.50%		
5.02.02.2.04					Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			15,500,000			37,500,000		42,301		-		-		-		42,301		42,301		0.27%		
						Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana [1383]	100 %		100 %		100 %		0 %		-		-		-		0 %		0 %		0.00%		
						Persentase realisasi dana darurat dan mendesak [1387]	25 %		25 %		25 %		0 %		-		-		-		0 %		0 %		0.00%		
5.02.02.2.04.0008					Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan [1144]			500,000			500,000		0		-		-		-		0		0		0,00%		
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan [4589]	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		-		-		-		0 Laporan		0 Laporan		0.00%		
5.02.02.2.04.0009					Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak [1169]			15,000,000			37,000,000		42,301		-		-		-		42,301		42,301		0,28%		
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak [4592]	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0 Laporan		-		-		-		0 Laporan		0 Laporan		0.00%		
5.02.03					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			50,448,426		26,107,014		26,855,210		5,436,539		-		-		-		5,436,539		5,436,539		10,78%	
						Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang [195]	33.3 %		34.00 %		33.3 %		8.33 %		-		-		-		8.33 %		8.33 %		25.02%		
5.02.03.2.01					Pengelolaan Barang Milik Daerah			50,448,426			26,855,210		5,436,539		-		-		-		5,436,539		5,436,539		10.78%		
						Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola [243]	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		100 %		100.00%		
						Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani [1866]	30 Dokumen		31 Dokumen		30 Dokumen		7 Dokumen		-		-		-		7 Dokumen		7 Dokumen		23.33%		
5.02.03.2.01.0010					Optimalisasi Penggunaan,			10,102,386			17,652,981		3,828,264		-		-		-		3,828,264		3,828,264		37,89%		



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DERAH KOTA SURABAYA
PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025



Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9	10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
						Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah [635]																					
						Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah [4580]	7679 Dokumen		8554 Dokumen		7679 Dokumen		1916 Dokumen		-		-		-		1916 Dokumen		1916 Dokumen		24.95%		
5.02.03.2.01.0013						Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota [3518]		3,138,336				1.388.350		283.594		-		-		-		283.594		283.594		9,04%	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota [4596]	60 Orang		60 Orang		60 Orang		60 Orang		-		-		-		60 Orang		60 Orang		100.00%		
5.02.03.2.01.0007						Pengamanan Barang Milik Daerah [637]		9,289,359				6.207.685		1.005.311		-		-		-		1.005.311		1.005.311		10,82%	
						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah [4581]	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		-		-		-		1 Laporan		1 Laporan		25.00%		
5.02.03.2.01.0009						Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah [638]		27,918,345				1.606.194		319.370		-		-		-		319.370		319.370		1,14%	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah [4582]	30 Laporan		31 Laporan		30 Laporan		7 Laporan		-		-		-		7 Laporan		7 Laporan		23.33%		



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya adalah Visi dan Misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus sejalan dan dapat mendukung tercapainya visi dan misi tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan dan peraturan-peraturan yang mendukung tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya. Untuk mewujudkan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Surabaya, didukung dari dana APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan Kota Surabaya yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mendukung misi 4 yaitu “Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”. Selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mewujudkan pencapaian misi 4 tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yaitu : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator Opini BPK.





Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu :

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset dengan indikator :
 - Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
 - Persentase aset tanah dan bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan aset tanah dan bangunan.

Secara garis besar perubahan rencana kerja dan pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 dijabarkan dalam format Tabel 3.1.

Adapun penjelasan dari tabel 3.1 dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini diukur dengan indikator kinerja tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 93% dan target setelah perubahan sebesar 93%. Kebutuhan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 250.876.863.418 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 114.316.742.120

Program ini terdiri atas 4 kegiatan antara lain :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 100% dan target capaian setelah perubahan sebesar 100%. Kebutuhan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 243.658.664.475 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 107.114.201.983

Kegiatan ini terdiri atas 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN diukur dengan indikator kinerja





jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 89 orang/bulan dan target capaian setelah perubahan sebesar 92 orang/bulan. Kebutuhan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 243.658.664.475 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 107.114.201.983. Pagu indikatif sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebelum perubahan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pagu indikatif setelah perubahan. Hal ini terjadi karena pada tahapan Rancangan Awal Perubahan Renja 2025, pagu indikatif Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dialokasikan untuk mengakomodasi gaji dan tunjangan ASN melalui rekrutmen CASN yang direncanakan mulai bekerja pada tahun 2025. Pada tahap Rancangan Awal Perubahan Renja 2025, belum diketahui rencana alokasi anggaran serta penempatan unit kerja dari pegawai baru yang masuk sehingga anggaran untuk sementara dialokasikan pada sub kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Informasi terkait penempatan pegawai baru pada masing-masing unit kerja telah diperoleh pada saat tahapan penyusunan Rancangan Perubahan Renja 2025 sehingga pagu indikatif Rancangan Perubahan Renja mengalami penurunan dibanding tahap Ranwal.

Adapun perubahan target pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target awal 89 orang/bulan menjadi 92 orang/bulan. Adapun perubahan target pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target awal sejumlah 89 orang/bulan menjadi 92 orang/bulan. Adapun perubahan ini dikarenakan adanya perubahan formasi kepegawaian melalui mekanisme rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024 sejumlah 4 orang dan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024





sejumlah 2 orang, serta adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil ke Perangkat Daerah lain sejumlah 3 orang.

b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja persentase pemenuhan unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 100% dan target capaian setelah perubahan sebesar 100%. Kebutuhan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 140.224.080 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 125.885.760. Kegiatan ini terdiri atas 1 sub kegiatan yaitu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya diukur dengan jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 200 unit dan target capaian setelah perubahan sebesar 200 unit. Kebutuhan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 140.224.080 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 125.885.760

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini diukur dengan 2 indikator yaitu :

- Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 100% dan target capaian setelah perubahan sebesar 100%
- Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 100% dan target capaian setelah perubahan sebesar 100%. Total kebutuhan pagu indikatif Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 2.880.882.923 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 2.979.701.549

Kegiatan ini terdiri atas 2 sub kegiatan antara lain :

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor diukur dengan indikator kinerja jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target capaian sebelum perubahan





sebesar 12 laporan dan target capaian setelah perubahan sebesar 12 laporan. Kebutuhan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 419.918.100 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 418,682,050

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor diukur dengan indikator kinerja jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 12 laporan dan target capaian setelah perubahan sebesar 12 laporan. Kebutuhan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 2.460.964.823 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 2.561.019.499

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja persentase ketepatan pemenuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 100% dan target capaian setelah perubahan sebesar 100%. Kebutuhan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 4.197.091.940 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 4.096.952.828

Adapun perubahan target pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja persentase ketepatan pemenuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dengan target awal 2.380 unit menjadi 1.182 unit. Pertimbangan perubahan target ini dikarenakan adanya kendaraan dinas operasional yang sudah terjual sebanyak 1.198 unit dengan rincian kendaraan dinas yang terjual Tahun 2024 sebanyak 1.124 unit dan kendaraan dinas yang telah dilelang Tahun 2025 sebanyak 74 unit.

Kegiatan ini terdiri atas 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan diukur dengan indikator kinerja jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 2.380 unit dan target capaian setelah perubahan sebesar





1.182 unit. Kebutuhan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 4.197.091.940 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 4.096.952.828

Adapun perubahan target pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator kinerja persentase ketepatan pemenuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dengan target awal 2.380 unit menjadi 1.182 unit. Pertimbangan perubahan target ini dikarenakan adanya kendaraan dinas operasional yang sudah terjual Tahun 2024 sebanyak 1.124 unit. Kendaraan dinas yang telah dilelang Tahun 2025 sebanyak 74 unit.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diukur dengan indikator kinerja persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 100% dan target capaian setelah perubahan sebesar 100%. Kebutuhan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 44.340.561.714 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 125.028.379.170

Program terdiri atas 4 kegiatan antara lain :

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah diukur dengan indikator kinerja jumlah laporan koordinasi dan Penyusunan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 7 dokumen dan target capaian setelah perubahan sebesar 7 dokumen. Kebutuhan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 3.580.703.700 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 3.635.954.721. Kegiatan ini terdiri atas 4 sub kegiatan antara lain :
 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS diukur dengan indikator kinerja jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang





disusun dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 2 dokumen dan target capaian setelah perubahan sebesar 2 dokumen. Kebutuhan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 1.230.976.000 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 1.230.976.000

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS diukur dengan indikator kinerja jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun dengan target capaian sebesar 2 dokumen dan target capaian setelah perubahan sebesar 2 dokumen. Kebutuhan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 321.125.920 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 321.125.920
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan target kinerja jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 1 dokumen dan target capaian setelah perubahan sebesar 1 dokumen. Kebutuhan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 759.023.324 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 711.540.963
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD diukur dengan indikator kinerja jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 2 dokumen dan target capaian setelah perubahan sebesar 2 dokumen. Kebutuhan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 1.269.578.456 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 1.372.311.838
- b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Kegiatan ini diukur dengan 2 indikator kinerja yaitu :
- Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian





Pembayaran yang Dilayani dengan target sebelum perubahan sebesar 99.464 berkas dan target setelah perubahan sebesar 101.964 berkas.

- Jumlah Dokumen Laporan dan Perhitungan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang Dikelola dengan target sebelum perubahan sebesar 244 dokumen dan target setelah perubahan sebesar 244 dokumen.

Total kebutuhan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 1.932.405.240 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 1.989.293.003

Adapun perubahan target pada kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan indikator kinerja jumlah berkas pencairan dana secara elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani dengan target awal 99.464 berkas menjadi 101.964 berkas. Pertimbangan perubahan target ini dikarenakan adanya rekrutmen pengangkatan CPNS pada Bulan Juli 2025 dan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Bulan Oktober 2025, sehingga diperkirakan adanya peningkatan volume mekanisme pembayaran.

Kegiatan ini terdiri atas 2 sub kegiatan yaitu :

- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah diukur dengan indikator kinerja jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 244 dokumen dan target capaian setelah perubahan sebesar 244 dokumen. Kebutuhan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 541.827.575 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 598.574.548
- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta pemungutan dan pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait diukur dengan indikator kinerja jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 99.464 dokumen dan target capaian





setelah perubahan sebesar 101.964 dokumen. Kebutuhan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp 1.390.577.665 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 1.390.718.455

Adapun perubahan target pada sub kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait dengan indikator kinerja jumlah berkas pencairan dana secara elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani dengan target awal 99.464 berkas menjadi 101.964 berkas. Pertimbangan perubahan target ini dikarenakan adanya rekrutmen pengangkatan CPNS pada Bulan Juli 2025 dan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Bulan Oktober 2025, sehingga diperkirakan adanya peningkatan volume mekanisme pembayaran.

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Disusun dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 24 dokumen dan target capaian setelah perubahan sebesar 24 dokumen. Kebutuhan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 1.327.452.774 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 1.327.558.139

Kegiatan ini terdiri atas 1 sub kegiatan yaitu Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diukur dengan indikator kinerja jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 24 dokumen dan target capaian setelah perubahan sebesar 24 dokumen. Kebutuhan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 1.327.452.774 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 1.327.558.139

d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan ini diukur dengan 2 indikator yaitu :

- Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah





terdampak bencana diukur dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 100% dan target capaian setelah perubahan sebesar 100%

- Persentase realisasi dana darurat dan mendesak dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 25% dan target capaian setelah perubahan sebesar 25%

Total kebutuhan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 37.500.000.000 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 118.075.573.307

Kegiatan ini terdiri atas 2 sub kegiatan antara lain :

- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan diukur dengan indikator kinerja jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 1 laporan dan target capaian setelah perubahan sebesar 1 laporan. Kebutuhan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 500.000.000 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 500.000.000
- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak diukur dengan indikator kinerja jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 1 laporan dan target capaian setelah perubahan sebesar 1 laporan. Kebutuhan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 37.000.000.000 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 117.575.573.307

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diukur dengan indikator kinerja persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 33.3% dan target capaian setelah perubahan sebesar 33.3%. Kebutuhan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 26.855.209.881 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 28.260.326.640

Program ini terdiri atas 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kegiatan ini diukur dengan 2 indikator kinerja yaitu:

- Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani dengan target





capaian sebelum perubahan sebesar 30 dokumen dan target capaian setelah perubahan sebesar 30 dokumen

- Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 100% dan target capaian setelah perubahan sebesar 100%

Total kebutuhan pagu indikatif Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 26.855.209.881 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 28.260.326.640

Kegiatan ini terdiri atas 4 sub kegiatan antara lain :

- Pengamanan Barang Milik Daerah diukur dengan indikator kinerja yaitu jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 4 laporan dan target capaian setelah perubahan sebesar 4 laporan. Kebutuhan pagu indikatif Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 6.207.685.046 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 6.252.538.591
- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan barang Milik Daerah diukur dengan indikator kinerja jumlah Laporan hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 30 laporan dan target capaian setelah perubahan sebesar 30 laporan. Kebutuhan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 1.606.193.677 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp. 1.594.952.516
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah diukur dengan indikator kinerja jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 7.679 dokumen dan target capaian setelah perubahan sebesar 7.679 dokumen. Kebutuhan pagu indikatif sebesar 17.652.981.053 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar





Rp. 18.953.778.224

- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator kinerja jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan target capaian sebelum perubahan sebesar 60 orang dan target capaian setelah perubahan sebesar 60 orang. Kebutuhan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 1.388.350.105 dan kebutuhan pagu indikatif setelah perubahan sebesar Rp.1.459.057.309

Dalam upaya pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senantiasa melakukan pengembangan inovasi baik pengembangan inovasi yang sifatnya baru ataupun penyempurnaan aplikasi yang sudah ada. Diharapkan hadirnya inovasi ini bisa menjadi stimulus dalam pencapaian target kinerja. Adapun inovasi yang telah dikembangkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain :

1. e-Budgeting

Aplikasi ini merupakan aplikasi terkait perencanaan penyusunan anggaran Perangkat Daerah

2. e-Payment

Aplikasi ini merupakan aplikasi terkait mekanisme pembayaran Perangkat Daerah

3. e-Accounting

Aplikasi ini merupakan aplikasi terkait penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan perangkat Daerah

4. SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah)

Aplikasi ini merupakan aplikasi sistem pengelolaan Barang Milik Daerah yang terintegrasi. Aplikasi SIMBADA beberapa kali melakukan penambahan fitur menyesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah

5. SIGASDA (Sistem Informasi Penggunaan Aset Daerah)

Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis website yang berfungsi untuk monitoring pemanfaatan Barang Milk Daerah berupa tanah dan bangunan (IPT, IPR, HGB/HPL, sewa, pinjam pakai, dan padat karya). Aplikasi ini terintegrasi dengan SIMBADA,





SSWAlfa, dan PBB Online

6. e-RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah)
Aplikasi ini merupakan aplikasi terkait rencana Penyusunan rencana kebutuhan barang Perangkat Daerah
7. e-SIPGAD (Sistem Informasi Pengelolaan Gudang Aset Daerah)
Aplikasi ini merupakan aplikasi penghapusan Barang Milik Daerah yang sudah tidak terpakai
8. e-SIMKOD (Sistem Informasi Manajemen Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Daerah)
Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis website yang digunakan untuk manajemen kendaraan dinas operasional daerah terkait data kendaraan, pemeliharaan kendaraan, pajak kendaraan, dan pinjam pakai kendaraan. Aplikasi ini memudahkan dalam hal penyediaan data kendaraan serta laporan kegiatan terkait kendaraan
9. ASIST (Aplikasi Sertipikat Aset tanah Kota Surabaya)
Aplikasi ini merupakan aplikasi untuk mendukung proses sertipikat aset tanah Pemerintah Kota Surabaya yang terntegrasi dengan SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah)
10. ASING (Aplikasi Sidang)
Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk pencatatan sengketa hukum bangunan, tanah, dan aset yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya
11. SIMPANAN (Sistem Informasi Manajemen Arsip IPT)
Aplikasi ini merupakan aplikasi pengelolaan arsip Izin Pemakaian Tanah (IPT) Pemerintah Kota Surabaya





Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93 %	250,876,863,418	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93 %	114,316,742,120	
	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	243,658,664,475	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	107,114,201,983	
	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan	243,658,664,475	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/bulan	107,114,201,983	
	5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100 %	140,224,080	5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100 %	125,885,760	
	5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200 Unit	140,224,080	5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	200 Unit	125,885,760	
	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %	2,880,882,923	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %	2,979,701,549	
			Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %				Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %		
	5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	419,918,100	5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	418,682,050	





BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DERAH KOTA SURABAYA
PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,460,964,823	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,561,019,499	
	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketepatan pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	4,197,091,940	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketepatan pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	4,096,952,828	
	5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2380 Unit	4,197,091,940	5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.182 Unit	4,096,952,828	
2	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100 %	44,340,561,714	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100 %	125,028,379,170	
	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun	7 Dokumen	3,580,703,700	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan yang disusun	7 Dokumen	3,635,954,721	
	5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	1,230,976,000	5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	1,230,976,000	



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DERAH KOTA SURABAYA
PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	321,125,920	5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	321,125,920	
	5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	759,023,324	5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	711,540,963	
	5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	1,269,578,456	5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	1,372,311,838	
	Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					
	5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani	99464 berkas	1,932,405,240	5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani	101.964 berkas	1,989,293,003	
			Jumlah Dokumen Laporan dan Perhitungan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	244 Dokumen				Jumlah Dokumen Laporan dan Perhitungan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	244 Dokumen		
	5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	244 Dokumen	541,827,575	5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	244 Dokumen	598,574,548	



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DERAH KOTA SURABAYA
PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	99464 Dokumen	1,390,577,665	5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	101.964 Dokumen	1,390,718,455	
	5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	24 Dokumen	1,327,452,774	5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	24 Dokumen	1,327,558,139	
	5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	24 Dokumen	1,327,452,774	5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	24 Dokumen	1,327,558,139	
	5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana	100 %	37,500,000,000	5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana	100 %	118,075,573,307	
			Persentase realisasi dana darurat dan mendesak	25 %				Persentase realisasi dana darurat dan mendesak	25 %		
	5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	500,000,000	5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	500,000,000	
	5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	37,000,000,000	5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	117,575,573,307	
3	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	33,3 %	26,855,209,881	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	33,3 %	28,260,326,640	
	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	30 Dokumen	26,855,209,881	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	30 Dokumen	28,260,326,640	



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DERAH KOTA SURABAYA
PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	100 %				Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	100 %		
	5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	6,207,685,046	5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	6,252,538,591	
	5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan	1,606,193,677	5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30 Laporan	1,594,952,516	
	5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7679 Dokumen	17,652,981,053	5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7679 Dokumen	18,953,778,224	
	5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	60 Orang	1,388,350,105	5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	60 Orang	1,459,057,309	



**BAB IV
PENUTUP**

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rancangan RKPD Tahun 2026. Dokumen ini merupakan bentuk penyempurnaan Dokumen Renja berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025.

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 10 Juni 2025

Pt. KEPALA BADAN,

DEWI SOERİYAWATI, ST. MT

Pembina Tingkat I
NIP. 197405132001122001

